

Pola Pergantian dan Tipe Kepemimpinan Raja di Kerajaan Sunda (Suatu Telaah Pendahuluan)

W. Anwar Falah

Keywords: historiography, monarchy, reign, Kingdom of Sunda, Pajajaran

How to Cite:

Falah, W. Pola Pergantian dan Tipe Kepemimpinan Raja di Kerajaan Sunda (Suatu Telaah Pendahuluan). *Berkala Arkeologi*, 14(2), 115–118.

<https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.709>



Berkala Arkeologi

<https://berkalarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 14 No. 2, 1994, 115-118

DOI: [10.30883/jba.v14i2.709](https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.709)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

POLA PERGANTIAN DAN TIPE KEPEMIMPINAN RAJA DI KERAJAAN SUNDA (Suatu Telaah Pendahuluan)

W. Anwar Falah
(Balai Arkeologi Bandung)

Pemahaman Sunda sebagai kerajaan kuna di Jawa Barat sejak awal abad ke-8 M hingga menjelang akhir abad ke-16 M, kiranya telah mendapat pengakuan sejarah sehubungan dengan historiografi kerajaan kuna di Indonesia. Sementara nama Pajajaran, atau lengkapnya Pakuan Pajajaran semula diduga sebagai nama kerajaan, namun selanjutnya berubah penafsirannya sebagai nama ibukota atau pusat pemerintahan Kerajaan Sunda. Melalui penafsiran sumber-sumber tekstual yang ada yaitu meliputi sejumlah prasasti, catatan-catatan asing (Cina, Portugis), serta naskah-naskah kuna lokal, diketahui bahwa ibukota/pusat pemerintahan Kerajaan Sunda sepanjang sejarahnya mengalami beberapa kali perpindahan. Perpindahan ibukota itu terjadi sebagai akibat terjadinya perkawinan antara Sanjaya, pewaris tahta Galuh dengan putri Kerajaan Sunda. Kekuasaan Kerajaan Sunda meliputi wilayah sepanjang Sungai Citarum ke barat, meluas mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Barat (sekarang). Adapun wilayah Galuh diperkirakan meliputi sebatas Sungai Citarum ke timur.

Setelah Sanjaya berhasil merebut kembali tahta Galuh, yang sebelumnya direbut oleh Purbasora dari ayahnya (Sena), pemerintahan Kerajaan Sunda berada di Galuh. Lokasi Galuh diperkirakan di Bojong Galuh sekarang, sebuah tempat di kilometer 10 sebelah timur kota Ciamis (Jawa Barat). Berkaitan dengan beberapa perpindahan ibukota Kerajaan Sunda, salah satunya adalah Kawali (19 km sebelah utara kota Ciamis). Dengan demikian dapat diperkirakan lokasi Pakuan Pajajaran terletak di Jawa Barat bagian barat (sekitar Bogor sekarang). Galuh dan Kawali berada di Jawa Barat bagian timur yang berada di daerah pedalaman, sedangkan Pakuan Pajajaran secara langsung dihubungkan ke laut oleh Sungai Ciliwung, yang cukup besar serta diperkirakan sebagai sarana transportasi pada waktu itu.

Sehubungan dengan kepentingan historiografi pemerintahan Kerajaan Sunda, hal-hal yang dijadikan dasar pemahaman adalah:

- 1) kerajaan ini mengisi babakan sejarah kuna yang sangat panjang yaitu, meliputi hampir 8 abad;
- 2) pusat pemerintahan atau ibukota dari kerajaan ini sepanjang rangkaian sejarahnya mengalami beberapa kali perpindahan dengan urutan

Pakuan Pajajaran (Bogor) - Galuh (Ciamis) -
Pakuan Pajajaran (Bogor) - Kawali (Ciamis) -
Pakuan Pajajaran (Bogor).

Pola Pergantian Raja

Telah dijelaskan di atas bahwa rangkaian sejarah Kerajaan Sunda meliputi kurun waktu yang sangat panjang, yaitu sekitar 8 abad. Sudah semestinya sepanjang rangkaian sejarahnya mengalami berulang kali pergantian raja. Kajian pola pergantian raja pada Kerajaan Sunda selama ini belum banyak dilakukan. Beberapa tulisan telah mencoba merangkai silsilah raja-raja Sunda, dengan menggunakan sumber-sumber historiografi Kerajaan Sunda yang ada (Sutaarga, 1965; Atja, 1968; 1970; Danasasmita, 1975). Hal tersebut sedikit banyak membantu upaya interpretasi pola pergantian raja Kerajaan Sunda. Kajian pergantian tahta kerajaan-kerajaan Indonesia kuna, yang dapat dijadikan acuan dalam mengkaji pola pergantian raja, pernah dikemukakan oleh Ri-boet Darmosoetopo (1980). Dari uraiannya dapat dipetik 4 buah pola suksesi yang terjadi dalam sejarah kerajaan-ke-ajaan Indonesia kuna yaitu, bertalar belakang:

- 1) Hak waris genealogis secara hirarkis;
- 2) Perkawinan;
- 3) Perebutan Kekuasaan;
- 4) Faktor Kelayakan/Jasa besar.

Keempat pola suksesi tersebut secara tersirat didasarkan pada sumber-sumber historiografi.

Melalui analisis sumber-sumber historiografi Kerajaan Sunda, pola pergantian raja yang baku (normal) pada kerajaan-kerajaan kuna di Indonesia didasarkan pada hubungan keturunan, yang umumnya berciri *patrilineal* atau menurut garis ayah, pola ini dikecualikan untuk pergantian raja pada kasus-kasus tertentu, seperti kasus pewarisan tahta akibat hubungan perkawinan yaitu pewarisan tahta dari mertua kepada menantu. Namun demikian kasus pewarisan tahta akibat hubungan perkawinan masih dinilai wajar serta absah dalam tradisi kerajaan-kerajaan kuna, terutama di Pulau Jawa. Pergantian raja pada kasus perebutan tahta atau pewarisan tahta yang didasarkan pertimbangan kelayakan kepada seseorang yang bukan putra mahkota dinilai sebagai penyimpangan dari kodrat, yang cenderung menimbulkan masalah di kemudian hari (Darmosoetopo, 1980: 52).

Atas dasar kebakuan pola pergantian raja berdasarkan hubungan keturunan, maka genealogi atau silsilah menjadi faktor penting sebagai alat legitimasi dari seseorang yang menduduki tahta. Hal ini memberi pemahaman bagi kita, bahwa prasasti-prasasti yang memuat silsilah di dalamnya kiranya berkaitan dengan peringatan pengukuhan atau penobatan seorang raja

Prasasti-prasasti pada masa awal Kerajaan Sunda hingga saat ini belum ditemukan. Hal tersebut menjadikan tidak adanya kesinambungan dari prasasti Canggal (732 M) dalam hubungannya dengan tokoh Sanjaya yang dikisahkan secara panjang lebar dalam naskah Carita Parahiyangan (abad XVI M). Sehingga masih menjadi "teka-teki" yang belum terpecahkan.

Sumber prasasti dalam kaitan upaya penafsiran tentang pola pergantian raja di Kerajaan Sunda, yang mendukung berlakunya pola pergantian raja berdasarkan hubungan keturunan, adalah prasasti Batutulis serta prasasti Kebantenan. Keduanya berasal dari abad XVI M. Kedua prasasti tersebut memuat tokoh-tokoh (raja) yang satu sama lain mempunyai hubungan darah 'cucu-ayah-kakek'.

Naskah Carita Parahiyangan yang memiliki ciri historografi tradisional serta telah memperoleh pengakuan sebagai sumber sejarah yang dinilai berbobot (*credible*) (Sumadio, 1984: 357), sejauh ini merupakan sumber yang paling kaya informasi mengenai kelangsungan pemerintahan raja-raja di Kerajaan Sunda, sejak awal. Naskah tersebut merupakan bagian dari Kropak 406 (Museum Nasional) mengungkap pola pergantian raja di Kerajaan Sunda. Secara tersirat naskah tersebut menerangkan bahwa cikal bakal raja-raja Kerajaan Sunda adalah Tarusbawa dan Sanjaya

Hubungan kedua tokoh tersebut adalah hubungan mertua dan menantu. Bagian lain dari Kropak 406 ditegaskan pergantian (*disilihan*) tahta dari Tarusbawa kepada Sanjaya. Istilah *disilihan* mempertegas bahwa hubungan antara Tarusbawa dengan Sanjaya bukanlah hubungan darah. Sedangkan pergantian tahta karena hubungan keturunan/darah dari Sanjaya kepada penerusnya digunakan istilah *miseuweukeun*, yang artinya mewariskan tahta kepada putranya. Disebutkan bahwa Sanjaya *miseuweukeun* Rahyang Tamperan. Selanjutnya Rahyang Tamperan *miseuweukeun* Rahyang Banga. Saleh Danasasmita (1975) menafsirkan bahwa raja-raja Kerajaan Sunda selanjutnya adalah keturunan Rahyang Banga. Namun pendapat ini kiranya masih memerlukan penelitian yang lebih seksama.

Pergantian tahta dengan latar belakang perebutan kekuasaan dikisahkan dalam naskah Carita Parahiyangan yang terjadi pada masa Galuh awal. Dikisahkan bahwa suatu ketika Purbasora

merebut tahta Galuh dari Sena. Selanjutnya dikisahkan, Sena disingkirkan ke G. Merapi. Diterangkan pula bahwa Sena berputra Rakeyan Jambri; yaitu nama lain dari Sanjaya. Setelah menikah dengan putri raja Sunda (Tarusbawa), Sanjaya memerangi Purbasora dan berhasil merebut kembali tahta Galuh.

Sumber lain yang menerangkan mengenai pola pergantian raja di Kerajaan Sunda adalah catatan perjalanan Tome Pires (1513 M). Pires menerangkan bahwa hak waris tahta di Kerajaan Sunda diturunkan kepada anak, tetapi jika raja tidak berputra, maka yang menggantikannya dipilih di antara raja daerah yang terbesar (Sumadio, 1984: 379).

Tipe Kepemimpinan Raja

Aspek lain yang cukup panjang lebar diuraikan dalam naskah Carita Parahiyangan (CP) adalah tipe kepemimpinan raja. Pada dasarnya tipe kepemimpinan raja itu bersumber pada konsepsi-konsepsi keagamaan, tata susila/hukum, tradisi leluhur, serta sistem nilai budaya, yang menjadi kerangka acuan di Kerajaan Sunda. Tipe ideal kepemimpinan raja pada garis besarnya adalah: yang taat mengikuti agama, memelihara tradisi leluhur, menghormati kaum agamawan (pertapa/pendeta), serta memakmurkan dan menenteramkan negeri.

Uraian mengenai raja-raja Kerajaan Sunda dalam naskah CP antara lain mengungkapkan:

Sang Manarah menjadi raja selama 80 tahun, karena sempurna menunaikan kewajiban agama

Sang Manisri menjadi raja selama 60 tahun, karena memperhatikan Sanghyang Siksa (Kandang Karesian).

Peninggalan Sang Susuk Tunggal merupakan warisan negeri yang indah dan makmur, sebagai bukti raja utama. Ia menjadi raja selama 100 tahun.

Sang Lumahing Kreta menjadi raja selama 92 tahun, karena berpegang teguh kepada perbuatan utama, mengalami jaman keemasan.

Sang Rakeyan Darmasiksa, penjelmaan Sanghyang Wishnu. Dialah yang membuat panti pendidikan (*mandala*), yang menjadikan tempat-tempat suci bagi sang rama, sang resi, sang disri, sang tarahan di tempat-tempat pemujaan. Dari mana pengetahuannya? Dari para wiku yang melaksanakan keaslian Sunda, berpegang teguh kepada Sanghyang Darma, mengamalkan Sanghyang Siksa. Ia menjadi raja selama 150 tahun

Prabu Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan di Nusalarang di bukit Wanakusuman

Menjadi raja selama 104 tahun, karena sempurna dalam agama, mengalami masa keemasan. Tindakannya seperti orang tua sekalipun masih muda, karena raja mengikuti satmata, mengikuti bimbingan pengasuhnya, Hyang Bunisora.

Demikianlah, mungkin ada yang hendak meniru perilaku yang dipusarakan ke Nusalarang. Mau mengikuti satmata, oleh karena itu mengalami masa keemasan mengikuti nasihat pengasuhnya. Oleh karena itu sang rama dapat tenteram mengurus bahan pangan, sang resi dapat tenteram melaksanakan tugas kependetaannya, menjalankan kebiasaan leluhur, keaslian masa silam. Sang Disri dapat tenteram meramu obat-obatan. (Raja) melaksanakan hukum-hukum kemanusiaan, membagi-bagikan hutan dan daerah sekitarnya. Tidak digugat oleh yang kecil maupun yang besar. Maka Sang tarahan dapat tenteram berlayar memenuhi peraturan raja

(Sang raja) memenuhi undang-undang raja, berpijak pada Sanghyang Linggawesi. Ia bertapa dan memuja tanpa henti. Sang wiku tenteram menunaikan undang-undang dewa, melaksanakan Sanghyang Watangaung, tenteram menjadi manusia raja pertapa.

Sang Ratu Jayadewata yang dipusarakan di Ranamaya menjadi raja selama 39 tahun. (setia kepada) kebiasaan dan keaslian leluhur, oleh karena itu tidak akan kedatangan oleh musuh kasar dan musuh halus. Sejahteralah di utara, selatan, barat dan timur, karena perasaan yang tenteram.

Prabu Surawisesa, dipusarakan di Padaren. Ia perwira, perkasa dan pemberani. Ia berperang lima belas kali, tidak kalah ... Ia menjadi raja selama 14 tahun.

Sebaliknya, dikemukakan pula tipe raja yang buruk/tidak baik. Beberapa ciri tipe raja tidak baik ialah raja yang suka mengganggu, menghalangi orang yang sedang beribadat, tidak mengikuti ajaran agama secara benar, perilakunya buruk, suka main perempuan, mencintai wanita larangan (wanita yang sudah dilamar oleh lelaki lain, wanita kebanyakan, wanita yang sudah ditabukan, ibu tiri), menganiaya orang tak bersalah, merampas hak orang lain, tidak berbakti kepada orang tua, menghina kaum agama, kerjanya bersenang-senang (makan makanan lezat, menempati istana mewah), menyebar kemaksiatan, dan perhatiannya tertumpah pada kenikmatan duniawi, sebagaimana dituturkan di bawah ini.

Rahyang Tamperan menjadi raja selama 7 tahun, karena kelakuannya senang membina-

sakan orang yang sedang bertapa. Oleh karena itu ia tidak lama menjadi raja.

Rahyang Banga menjadi raja selama 7 tahun karena perilakunya tidak mengikuti agama secara benar.

Sang Lumahing Hujung Cariang menjadi raja selama 3 tahun. Tahun keempat turun tahta karena buruk kelakuannya, senang mengambil wanita dengan memperlakui wanita lain.

Tohaan di Galuh, yaitu yang dipusarakan di Gunungtiga, menjadi raja selama 7 tahun, karena salah mencintai wanita larangan (gadis tukon) yang berasal dari luar.

Sang Ratu Saksi Sang Mangabatan di Tasik yaitu yang dipusarakan di Pengpelengan. Menjadi raja selama 8 tahun, akibat perilakunya kena bencana oleh wanita larangan dan ibu tirinya. Ia membunuh orang-orang yang tak bersalah, merampas hak orang tanpa perasaan, tidak berbakti kepada orang tua, menghina para pendeta.

Sang Nilakendra, kerjanya tiada lain kecuali bersenang-senang selamanya, akhirnya menyebar kemaksiatan. Mempunyai anak perhatiannya tertimbun dengan kenikmatan dunia. Menurunkan pertapa cucu saudara tirinya. Air penyebab kemabukan dijadikan pelezat makanan dan minum. Menjadi raja selama 16 tahun" (Atja, 1981: 33-38).

Tipe raja ideal rupanya tidak hanya diukur menurut mentalitas atau kepribadian saja melainkan faktor fisik dipertimbangkan juga, taklaka dilakukan pemilihan calon raja. Fisik yang sempurna rupanya merupakan ketentuan utama yang patut dimiliki seorang calon raja. Begitulah misalnya, naskah CP menerangkan bahwa Rahiyangtang Werek tidak dapat menjadi raja, sekalipun mempunyai hak waris, karena giginya ompong. Karena itulah ia dinamai juga Rahiyang Sempakwaja (gigi tanggal). Begitu pula Rahiyangtang Kidul urung menjadi raja karena hernia (Atja, 1981: 29).

KEPUSTAKAAN

- Amir Sutaarga, Moh, 1965, **Prabu Siliwangi, Duta Rakyat**, Bandung.
- Atja, 1968, **Tjarita Parahijangan**, Jajasan Kebudayaan Nusalarang, Bandung
- Danasasmita, Moh. Saleh, 1975, *Latar Belakang Sosial Sejarah kuno Jawa Barat dan Hubungan Antara Galuh Dengan Pajajaran. Sejarah Jawa Barat Dari masa Pra Sejarah Hingga masa Penyebaran agama Islam*, Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat, Bandung.
- Darmosoetopo, R. (1980). SEDIKIT URAIAN TENTANG PERGANTIAN TAHTA (KERAJAAN INDONESIA KUNA DARI ABAD 4 - 11 M). *Berkala Arkeologi*, 1(1), 52–57.
<https://doi.org/10.30883/jba.v1i1.276>
- Sumadio, Bambang (ed.), 1984, **Sejarah Nasional Indonesia II**, Jakarta.